

Topik Bahasan Tanggal 3 - 5 September: **Etos Kelas Menengah**

di Indonesia

Meratapi Kelas Menengah

Jika kita hendak menyoroti etos politik kelas menengah Indonesia pada masa ini, maka perlu diperjelas terlebih dahulu apa atau siapa yang dimaksudkan dengan kelas menengah tersebut.

Sudah terlalu lama dan terlalu banyak orang yang asyik mempersoalkan perlaku ekonomi, politik atau gaya hidup kelas menengah tanpa cukup hati-hati mengidentifikasikan siapa yang dibicarakannya sebagai kelas menengah. Akibatnya, bagaiakan memperdebat gaya, kecepatan atau tinggi terbangnya suatu makhluk yang ternyata bukan sejenis unggas tapi sejenis pohon.

Di antara berbagai ragam pengertian kelas menengah dalam bahasa Indonesia mutakhir, ada dua versi yang paling menonjol. Sampai saat ini, sebagian terbesar pembicaraan kelas menengah menunjukkan hanya atau terutama pada kaum pengusaha.

Yang disebut kelas dipahami terutama sebagai kategori ekonomi. Bukan kategori pelapisan atau polarisasi sosial secara luas. Sedangkan pengertian "menengah" paling sering diartikan sebagai jumlah konsumsi, gaji atau penghasilan yang terletak di antara rentangan dua kutub (tertinggi dan terendah).

Satu pengertian lain untuk kelas menengah yang tak kalah populernya jalah kelompok orang-orang yang hidup dengan harta berkelimpahan, dengan gaya hidup gemerlap, dan tidak menduduki jabatan tertinggi pada jenjang politik nasional. Pada versi pengertian yang kedua ini, istilah menengah menyesatkan.

Tidak jarang kelas menengah dibicarakan secara kabur sebagai mereka yang termasuk salah satu dari dua kategori di atas, atau mereka yang berada di antara keduanya. Yang pasti, semua perbincangan itu menduga atau berasumsi bahwa tingkat dan polarisasi sosial (misalnya politik dan budaya) ditentukan oleh tingkat kekuatan ekonomi.

Tidak sulit bagi siapa pun membantah asumsi determinisme-ekonomi yang terlanjur populer itu. Mereka yang sedera-jat dalam hal kekayaan tidak lebih bersatu dan dipersatukan sebagai suatu "kelas sosial" daripada mereka yang ber-

sekutu berdasarkan solidaritas seksual, usia, daerah asal, agama, ras, suku, atau nasionalitas. Jika benar dominasi sosial ditentukan oleh harta, maka tentunya parlemen dan istana negara Orde Baru diisi oleh banyak orang berkulit putih dan kaum bermata sipit.

Kesulitan lain dari cara membicarakan kelas menengah yang selama ini terlanjur kaprah ialah tidak jelasnya batas yang menengah dan yang tidak menengah, khususnya yang atas. Kelas bawah lebih mudah diketahui.

Seringkali, secara emplisit apa yang disebut kelas atas dipahami sebagai kaum elite politik negara. Maka yang muncul adalah bantuan standar ganda untuk konsep kelas. Kelas menengah dijelaskan sebagai kategori ekonomi. Kelas atas dijelaskan sebagai kategori politik. Selama kerancuan seperti ini tak dibenahi, pembicaraan tentang kelas menengah tak akan beranjak dari lembah kebingungan.

Kebiasaan mengidentifikasi kelas sebagai kategori ekonomi memang punya tradisi panjang dan kuat. Konsep kelas menjadi salah satu konsep unggulan favorit kaum marxis, yakni kaum yang punya beban mitos determinisme-ekonomi. Padahal Marx sendiri mungkin tidak se-deterministik yang diduga para pengikut maupun para penentangnya.

Dalam sejarah semantiknya, kelas menengah memang bertahun-tahun diidentikkan dengan kaum burjuis atau pengusaha. Tapi konteksnya layak kita pahami, agar kita tahu batas kelayakan memakainya dalam konteks yang sekarang. Kaum burjuis itu dulu dianggap sebagai kelas menengah pada tata sosial non atau pra kapitalistik di Eropa.

Pada masa itu ada yang disebut sebagai kelas atas, yakni kaum bangsawan, kaum ningrat serta tuan-tuan tanah. Ada yang disebut kelas bawah alias kaum jelata, yakni para hamba, budak, dan petani sawah. Kedua kelompok sosial itulah yang menjadi sepasang aktor utama dalam drama kehidupan pra kapitalis mereka.

Kaum burjuis? Pada masa itu mereka hanya pemain figur. Sebelum revolusi ilmu dan teknologi, kaum burjuis itu sering diabaikan. Mereka digolongkan se-

**Bahasan Drs Ariel Heryanto
M.A., Staf Pengajar UKSW
Salatiga**

bagai kelas menengah karena tidak termasuk di atas dan tidak di bawah.

Tapi kiasan atas bawah itu berakibat serius. Kaum burjuis sebenarnya tidak berada persis di tengah hubungan eksplotatif kelas atas dan bawah. Lebih tepat jika dikatakan kaum burjuis ini terletak di pinggir tengahnya.

Jelaslah, pada tata sosial itu yang disebut kelas menengah bukanlah bangsawan, ningrat, atau tuan tanah dengan pangkat atau gelar, atau jumlah harta penghasilan yang menengah. Jika berjuang, maka bangsawan dan tuan-tuan tingkat menengah hanya ingin jadi bangsawan dan tuan-tuan tanah dengan tingkat lebih tinggi dalam tata sosial yang sama dan sudah mapan. Perjuangan burjuis berbeda. Kepentingan mereka menuntut perombakan, karena tertindas, tata sosial yang ada. Pelajaran dari sejarah ini tidak disimak baik-baik oleh para pakar kita masa kini.

Karena letaknya yang agak pinggir itu-lah kaum burjuis mampu menjadi kekuatan revolusioner, menumbangkan tata kerajaan feodal dan membangun tata sosial kapitalis. Dengan revolusinya, kaum burjuis tidak sekedar menggantikan kedudukan kaum bangsawan dan tuan tanah. Mereka merombak tata masyarakat dan memperbarui pola (bukan menghapuskan) eksplotasi manusia atas manusia.

Kini kita hidup dalam tata sosial kapitalistik. Kaum burjuis alias kapitalis tidak lagi dapat dikatakan sebagai kelas menengah. Mereka sudah lama naik kelas menjadi para Bento, para tokoh papan atas. Mereka yang berada di kolong lapisan masyarakat, yang kini menjadi sepasang aktor utama dalam drama sosial masa kini.

Betapa buta sejarah jika secara sembarang kita sebut para konglomerat dan pengusaha kaya raya kita sebagai kelas menengah mutakhir. Jika benar ada yang dapat disebut sebagai atau semacam kelas menengah dalam masyarakat kita ini, maka pastilah mereka bukan pedagang, dengan gaji berapa pun. Kita harus mencari mereka yang berada tidak persis di tengah hubungan eksplotatif mekanis-

me produksi sosial. Tetapi, mereka yang agak di pinggiran.

Adakah mereka? Siapakah mereka? Saya termasuk orang yang berpandangan bahwa kaum intelektual yang paling mirip dengan kaum burjuis pada masa menjelang bangkitnya tata sosial kapitalis. Mereka yang paling berpeluang menjadi kelompok revolusioner untuk merombak tata sosial, yang kini menjadi suatu tata sosial baru ditandai oleh sentral atau fundamentalnya produksi informasi. Soal ini menuntut pembahasan tersendiri yang tak dapat disajikan di sini. Yang masih harus dibahas di sini adalah soal etos politik kelas menengah kita.

Di balik perbincangan tentang kelas menengah kelihatan adanya harapan. Sedangkan pada akhirnya terimpun ratapan.

Banyak orang berbicara tentang kelas menengah karena berharap menggebu-gebu akan terjadinya suatu perubahan sosial. Tetapi, pembicaraan —dengan kerancuan konseptual tadi— hampir selalu diakhiri dengan ratapan. Ternyata kaum pengusaha dan tokoh bergaya hidup canggih kita, yang diduga menjadi kelas menengah kok tidak punya etos oposisi, jangankan etos revolusioner. Aneka ejekan dan kecaman ditujukan kepada mereka itu. Salah siapa?

Para pengusaha kita tidak dapat dihaparkan menjadi pelopor perubahan, sebab mereka memang bukan kelas menengah dalam pengertian yang kita bahas tadi. Mereka tak punya kepentingan yang kini tertindas —sebagaimana kaum burjuis dulu— dan perlu mereka perjuangkan lewat perombakan sosial. Justru mereka diuntungkan oleh tata sosial yang ada sekarang. Wajarlah jika mereka akan memperjuangkan *status quo*. Kalau ada yang masih ditutut oleh mereka, maka itu liberalisasi politik dan ekonomi untuk lebih memperkuat kedudukan mereka.

Bukan suatu kebetulan jika bukan para pengusaha tapi intelektual yang selama ini gelisah dan suka meributkan tentang kelas menengah. Para intelektual yang kepentingan dan realisasi optimal kelasnya masih terbendung tata sosial yang ada.